

Refleksi Historis Supersemar

Oleh A Kardiyat Wharyanto

Tanggal 11 Maret 2015

genap 49 tahun keluarnya surat perintah Presiden Soekarno kepada Mayjen Soeharto selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat saat itu, sehingga dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Dalam surat itu Presiden Soekarno meminta Mayjen Soeharto untuk menjamin tercapainya keamanan dan ketertiban, serta keselamatan pribadi dan kekuasaan Presiden Soekarno.

Sekarang Supersemar itu tercatat sebagai momentum sejarah, baik bagi kehidupan politik maupun hukum dan pernah berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi kehidupan saat ini juga tidak terlepas dari dampak adanya Supersemar tersebut. Sekalipun Supersemar itu mempunyai penafsiran yang berlainan, namun dokumen tersebut telah menyejarah. Bagaimana refleksi historis Supersemar itu?

Selama 49 tahun terakhir tidak jarang kita menemui hambatan karena kecenderungan diputarinya kembali jam sejarah kemajuan

bangsa Indonesia oleh kekuatan-kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga kita sering mengalami gangguan dan hambatan. Dari penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila di masa lalu dapat ditelusuri dan dikenali rasanya ide-ide yang bukan bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila, hanya mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat, menghambat kemajuan pembangunan bangsa dan negara.

Pergulatan masyarakat Indonesia dalam proses kelanjutan sosial dewasa ini meliputi lebih dari 220 juta manusia Indonesia dari segala lapisan. Walaupun berada dalam kesulitan ekonomi, namun keadaan sekarang ini bila dibandingkan dengan kondisi sewaktu lahirnya Supersemar, memang masih lebih menguntungkan. Memang perbaikan ekonomi belum bisa sepenuhnya dapat teratasi, angkatan muda dan tenaga kerja belum bisa terampung oleh pembangunan ekonomi. Kesemuanya itu masih tetap merupakan desakan-desakan yang akan terus membayangi warna dan bentuk hari kita di masa mendatang.

Jika situasi 49 tahun lalu, kita anggap sebagai hari kemarin, kita yang ikut membentuk hari sekarang perlu menggalai hal-hal yang dapat diambil dari sejarah perkembangan kita dalam kurun waktu tersebut.

Dalam waktu singkat keme-

lut dapat diatasi dan persatuan nasional dapat ditegakkan lagi. Stabilitas dan sekuritas diprioritaskan sebagai landasan untuk membangun ekonomi. Dalam masa 49 tahun itu, tugas nasional yang penting adalah membina stabilitas nasional, di mana stabilitas politik termasuk salah satu unsur di dalamnya, yang sekahigus merupakan sasaran yang harus dicapai, dan merupakan syarat pokok jaminan berhasilnya pembangunan.

Dalam rangka membina stabilitas politik, program yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat, terutama kesadaran akan kehidupan demokrasi yang lebih transparan dan bertanggung jawab, serta hidup bernegara secara teratur berdasarkan konstitusi.

Dalam kehidupan yang demokratis, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat. Keluhuran manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan-keamanan diakui, ditata dan dijamin atas dasar kenegaraan Pancasila.

Bagaimanapun harus disadari bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya harus terus dipertahankan kesinambungannya dengan senantiasa menjaga keuletan bangsa dan negara Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia adalah menciptakan masya-

rakat yang adil dan makmur, aman dan sentosa.

Sewaktu negeri ini dalam kondisi lemah, negara tetangga kita berusaha mengalir ikan di air keruh. Setelah berhasil mencaplok Pulau Sipadan dan Ligitan, mereka mengincar dan mengklaim gugus-gugusan pulau lain yang terletak di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Jika kita lengah mempertahankan wilayah RI ini maka nasibnya akan sama dengan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Memertahankan kedaulatan RI jelas merupakan bagian dari pencapaian cita-cita bangsa Indonesia, sehingga jangan sampai disimpangi, tetapi harus terus diperjuangkan. Semua pihak harus bersatu dan bahu-membahu agar kedaulatan RI atas semua wilayahnya jangan lagi jatuh ke tangan bangsa lain.

Di samping itu, kita perlu memberikan kesempatan yang terbuka kepada pemerintah agar dapat memusatkan perhatiannya dan dapat mengambil kebijaksanaan yang paling baik untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat. Terutama, bagaimana pemerintah dapat menekan harga bahan kebutuhan pokok, terutama beras yang terus merangkak itu agar mudah dijangkau dengan kemampuan daya beli rakyat.

Memasuki peringatan 49 tahun Supersemar serta hampir 17 tahun masa reformasi, kedamaian dan kesejahteraan rakyat masih sering terusik. Kita akui bahwa setelah 49 ta-

hun Supersemar atau 17 tahun reformasi kita seperti melihat bangsa yang limbung, kehilangan optimisme dan harapan. Hal ini masih diperparah dengan munculnya berbagai kasus seperti pelemanan KPK, jatuhnya pesawat AirAsia, banjir besar di mana-mana, angin puting beliung di berbagai daerah, tanah longsor di Banjarnegara, dan berbagai bencana alam lainnya.

Sementara itu adegan korupsi semakin merasuk ke segala sendi kehidupan masyarakat, di beberapa tempat muncul kriminalitas sosial dan perkelahian antarkelompok, ditambah dengan pernyataan-pernyataan politik yang sering membingungkan. Di tengah pesimisme yang merebak itu rakyat merindukan kehidupan yang nyaman. Mereka menilai bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu mensejahterakan rakyat.

Terlepas dari apakah Supersemar telah diselewengkan atau tidak, sesungguhnya dengan Supersemar, bangsa Indonesia sudah menemukan kembali jalannya. Sayang, komitmen para pemimpin negeri ini terhadap rakyat lemah. Padahal sebenarnya, bukan hanya jalan yang ditemukan, tetapi dengan Supersemar itu pula bangsa ini telah diselamatkan dari kekuasaan komunis. Di sinilah sisi lain makna Supersemar. ***

Penulis adalah dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.